

**UPAYA PBB (PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA) DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN TERHADAP KRISIS KEMANUSIAAN DI YAMAN PADA TAHUN 2015-
2018**

*UN EFFORTS (STATE-NATION ASSOCIATION) IN GIVING ASSISTANCE TO THE
HUMANITARIAN CRISIS IN YAMAN 2015-2018*



Rahmat Azhar Affany

20150510256

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Dosen Pembimbing : Dr. Surwandono, S.Sos., M.Si.

**FAKULTAS SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

I. Judul : Upaya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dalam Memberikan Bantuan Terhadap Krisis Kemanusiaan di Yaman pada tahun 2015-2018

II. Nama : Rahmat Azhar Affany

III. Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

IV. Abstract

The conflict over the power of governance in Yemen has been going on for a long time and there is still no serious action from the UN. Since the escalation of conflict in Yemen increased, the United Nations carried out its duties so as to prevent the increase in the number of victims and damage in various fields. In carrying out its mission, the United Nations implemented the Responsibility to Protect by bringing together conflicting parties so that the conflict ends soon. The UN also provided Humanitarian Assistance to the population of Yemen to be protected from the crimes of humanity.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Yaman yang kompleks adalah salah satu konflik dan persaingan politik yang telah berlangsung selama hampir satu abad. Konflik Yaman adalah konflik antar saudara yang berkelanjutan antara dua faksi. Kedua kubu ini saling mengklaim sebagai pemegang pemerintahan Yaman. Pasukan Houthi mengendalikan ibukota Sana'a dan bersekutu dengan pasukan mantan presiden Ali Abdullah Saleh melawan pasukan pemerintah Mansur Hadi, yang berbasis di Aden (BBC, 2018). Pada 2004, Houthi menyatakan perang terhadap pemerintah. Pemberontakan terjadi dan pasukan pemerintah membunuh pemimpin Houthi, Abdul-Malik al-Houthi. Para pejabat Yaman menuduh kaum Houthi dan partai-partai oposisi Islam lainnya berusaha menggulingkan pemerintah. Namun para pemimpin Houthi menepis tuduhan itu dan mengklaim mereka membela diri. Mereka mengklaim mereka telah mengalami diskriminasi sosial dan agama serta marginalisasi politik. Selama beberapa tahun pemberontak Houthi dan pasukan pemerintah Yaman terus berkonflik secara berkala.

Kaum Houthi memboikot pemilihan presiden dengan calon tunggal pada awal 2012 yang berarti memberi Mansur Hadi masa jabatan dua periode. Hadi kemudian disumpah untuk masa jabatan dua tahun sebagai presiden pada Februari 2012 setelah pemilihan di mana ia berdiri tanpa perlawanan. Sementara itu, konflik antara suku Houthi dan Sunni di Yaman utara menyebar ke provinsi lain, termasuk provinsi Sana'a pada pertengahan 2014. Pada awal Januari 2015, Houthi tidak puas dengan proposal untuk membagi negara itu menjadi enam wilayah federal. Pasukan Houthi merebut kompleks kepresidenan di Sana'a. Krisis politik mengakibatkan pengunduran diri Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi dan menteri-menterinya. Kepemimpinan politik Houthi melakukan pembubaran parlemen dan pembentukan Komite Revolusi untuk memerintah negara pada 6 Februari 2015. Akhirnya, Houthi kembali melancarkan pemberontakan kepada pemerintahan Yaman dan terus berlanjut sampai sekarang. (BBC, 2018)

Sejak meletusnya konflik pada tahun 2015, jumlah korban jiwa mencapai 91.600 jiwa. Korban ini sebagian besar merupakan penduduk sipil Yaman meliputi wanita, orang dewasa dan anak-anak. Korban konflik juga berasal dari tentara, pejabat publik dan warga asing. Kemudian terdapat 18 juta warga yang membutuhkan bantuan kemanusiaan serta sekitar 500 ribu anak di Yaman menderita kekurangan gizi. Kondisi ini diperparah dengan rusaknya sebagian besar fasilitas kesehatan dan akses bahan makanan. Konflik yang terjadi di Yaman mengakibatkan kerusakan yang sangat besar terhadap berbagai aspek yakni banyak korban, fasilitas umum yang rusak, kesehatan menurun, kerusakan sumber daya alam dan ekonomi tidak stabil. (Lister, 2015). Kemudian akses kesehatan juga tidak memadai, sehingga banyak penyakit seperti gangguan pernafasan, infeksi luka, kekurangan gizi dan lain-lain menimpa penduduk Yaman. Penyakit-penyakit yang seharusnya dapat diatasi dengan mudah tidak dapat dilakukan dikarenakan oleh fasilitas medis, anggota medis dan pasokan obat-obatan yang kurang. Kekurangan fasilitas kesehatan ini membuat tidak mampu menyelamatkan korban konflik yang semakin lama semakin bertambah.

Indeks Perkembangan Kemanusiaan yang diperoleh Yaman menduduki peringkat 178 dari 189 negara. Indeks Perkembangan Kemanusiaan Yaman pada tahun 2015 sebesar 0,483, tahun 2016 sebesar 0,462 dan tahun 2017 sebesar 0,452 (UNHDR, 2019). Indeks ini menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Yaman setiap tahun mengalami penurunan. Angka ini diperoleh dari berbagai aspek yakni ekonomi, politik, angka kelahiran, angka kematian, usia harapan hidup, kesehatan dan lain-lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik di Yaman sudah selayaknya menjadi fokus dunia untuk diselesaikan. Konflik di Yaman membutuhkan bantuan nyata yang mana harus diperhatikan secara serius karena banyak penduduk sipil yang terkena dampak konflik yang berkepanjangan.

Degradasi tingkat kesejahteraan di Yaman ini membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai memberikan bantuan dalam bentuk konferensi untuk mencari solusi damai serta bantuan logistik untuk menjaga kelangsungan hidup penduduk Yaman. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 dan bermarkas di New York, Amerika Serikat. PBB mempunyai tujuan untuk mewujudkan perdamaian dan menuntaskan segala bentuk konflik di seluruh dunia. PBB juga sudah banyak melakukan upaya memberi bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik orang yang terkena bencana maupun karena konflik sehingga pada saat ini keadaan sudah menjadi lebih baik.

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi penduduk sipil dari konflik Yaman tahun 2015-2018 ?”

VI. Pembahasan

A. Kondisi Yaman Sebelum Eskalasi Konflik

Bentuk pemerintahan di Yaman yaitu Republik yang secara konseptual dikepalai oleh seorang Presiden. Republik Yaman merupakan gabungan antara Yaman Utara dan Yaman Selatan sejak tahun 1990. Republik Demokratik Rakyat Yaman atau Yaman Selatan memiliki bentuk pemerintahan Marxisme dan menjadi satu-satunya negara komunis yang ada di Timur Tengah, karena Yaman Selatan merupakan negara bekas jajahan Uni Soviet. Sedangkan Republik Arab Yaman atau Yaman Utara konservatif, negara ini merdeka pada tahun 1918 setelah jatuhnya kerajaan Ottoman (Republika, 2017). Setelah resmi bergabung, pada masa transisi Yaman dipimpin oleh Ali Abdullah Saleh selaku Presiden Yaman yang pertama dan Ali Salem al-Beidh sebagai wakilnya. Seorang politisi veteran selatan, Haider Abu Bakr Al-Attas diangkat menjadi perdana menteri. Kursi kabinet dibagi menjadi dua antara anggota People General Congress (PGC) dan Yemeni Socialist Party (YSP). Kota-kota penting kedua negara pun tetap difungsikan, Sana'a yang merupakan ibukota Yaman Utara tetap menjadi pusat politik sementara Aden yang merupakan ibukota Yaman Selatan menjadi pusat keuangan.

Unifikasi antara Yaman Utara dan Yaman Selatan yang berbeda ideologi ini disambut hangat oleh rakyat Yaman, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kepentingan masing-masing elit politik kedua negara dibalik terbentuknya Republik Yaman. Dilatar belakangi dari nasib yang menimpa para pemimpin Eropa Timur yang dibantai oleh rakyatnya sendiri, kemudian disusul dengan bubarnya Uni Soviet, sehingga membuat Presiden Yaman Selatan Ali Salem al-

Beidh berkepentingan untuk menyelamatkan diri dengan mengajak Yaman Utara bersatu. Di mana saat itu Yaman Selatan merupakan satu-satunya negara Arab yang berpaham Marxis. Ajakan Yaman Selatan ternyata direspon positif oleh Ali Abdullah Saleh selaku Presiden Yaman Utara (Luthfi, 2014). Karena unifikasi antara kedua negara ini dilatar belakangi kepentingan masing-masing elit politiknya, negara ini tidak dapat mempertahankan keharmonisannya.

Khawatir bahwa kerusuhan politik dan kekosongan keamanan yang terjadi di Yaman, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan anggota komunitas internasional lainnya berusaha untuk membuat kompromi politik. Sebuah rencana transisi telah dibuat, dan pada 2012 mantan Wakil Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi menjadi presiden. Dengan dukungan Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Hadi berusaha untuk mereformasi sistem politik Yaman. Sepanjang 2013, pemain kunci mengadakan Konferensi Dialog Nasional yang bertujuan mencapai konsensus nasional yang luas tentang tatanan politik baru.

Namun, pada Januari 2014 itu berakhir tanpa kesepakatan. Satu kelompok anti-pemerintah khususnya, gerakan Houthi Yaman utara, berusaha menggunakan kekuatan militer untuk membentuk kembali tatanan politik. Dalam beberapa minggu setelah Konferensi Dialog Nasional berakhir, ia melancarkan serangan militer terhadap berbagai sekutu suku Presiden Hadi. Houthi bergabung dengan pasukan yang masih setia kepada mantan Presiden Saleh, menciptakan aliansi kenyamanan yang merupakan lawan tangguh bagi Presiden Hadi dan sekutunya.

B. Eskalasi Konflik dan Dampak Konflik yang Dialami Penduduk Yaman

Pada tanggal 25 Maret 2015, Arab Saudi mengambil inisiasi untuk melakukan invasi militer terhadap Yaman guna melawan gerakan pemberontak Houthi dan mengembalikan kekuasaan presiden Mansour Hadi. Invasi tersebut didukung oleh seluruh negara Arab di kawasan Teluk dengan melakukan serangan udara terhadap Yaman dengan target utama wilayah yang menjadi pusat gerakan pemberontak Houthi. Tidak cukup hanya dengan serangan udara, selang beberapa hari kemudian Arab Saudi beserta sekutunya melakukan operasi darat dengan mengerahkan sejumlah kapal perang dan pasukan militer memasuki wilayah Yaman.

Menanggapi hal itu, Arab Saudi merespon dengan membentuk koalisi militer diantara negara-negara Jazirah Arab. Koalisi militer ini terdiri dari Qatar, Bahrain, Kuwait, Maroko, Sudan, Mesir, Uni Emirat Arab dan Yordan. Sedangkan Pakistan menyatakan tidak ingin memperparah keadaan dunia Islam. Koalisi ini bertujuan untuk merebut kembali kekuasaan pemerintahan Yaman dari kelompok Houthi. Pada tanggal 26 Maret 2015 koalisi Arab Saudi

melakukan serangan udara kepada kelompok Houthi. Amerika Serikat juga memberi bantuan militer yang disebut *Decisive Storm* kepada Arab Saudi agar memperkuat serangan serta memenangkan pertempuran. (Carboni, *Special Focus On Coalition Forces In the Middle East : the Saudi-led Coalition in Yemen*, 2019)

Sejak Maret 2015, beberapa serangan udara koalisi pimpinan Saudi yang paling mematikan. Pada September 2015, serangan udara koalisi yang dipimpin Saudi menghantam pesta pernikahan, menewaskan sedikitnya 81 warga sipil. Pada Maret 2016, serangan udara koalisi yang dipimpin Saudi menghantam pasar di barat laut Yaman, menewaskan sedikitnya 97 warga sipil dan sekitar 10 pejuang Houthi. Pada Oktober 2016, serangan udara koalisi yang dipimpin Saudi menghantam aula pemakaman di Sanaa, menewaskan antara 130 dan 150 orang. Pada Desember 2017, Dalam satu hari, serangan udara koalisi yang dipimpin Saudi menghantam pasar di provinsi Ta'izz menewaskan 54 orang sementara serangan kedua menewaskan 14 anggota satu keluarga di provinsi Hudaydah. Pada April 2018, serangan udara koalisi yang dipimpin Saudi menghantam pesta pernikahan di provinsi Hajjah, menewaskan lebih dari 20 orang. Pada Agustus 2018, serangan udara koalisi yang dipimpin Saudi menabrak bus di sebuah pasar dekat Dahyan, Yaman, di gubernuran Sa'dah utara yang berbatasan dengan perbatasan Saudi, menewaskan 51 orang, 40 di antaranya adalah anak-anak. Koalisi mengklaim bahwa serangan udara itu adalah "operasi militer yang sah" yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap serangan rudal Houthi di kota Saudi Jizan sehari sebelumnya yang menewaskan seorang warga Yaman di kerajaan itu.

Pejabat Saudi mengakui bahwa beberapa operasi mereka secara tidak sengaja telah menyebabkan korban sipil, sambil mempertahankan bahwa kampanye militer mereka adalah tindakan membela diri yang sah karena serangan lintas-perbatasan mematikan yang berulang-ulang dari musuh-musuh mereka di Yaman, termasuk serangan rudal balistik. Serangan Saudi telah difokuskan pada target yang berhubungan dengan rudal, yang diduga unit dan lokasi pertempuran Houthi, dan pemimpin senior Houthi. Kadang-kadang, Tim Penilai Insiden Gabungan koalisi (JIAT) telah meninjau serangan udara di mana korban sipil dilaporkan.

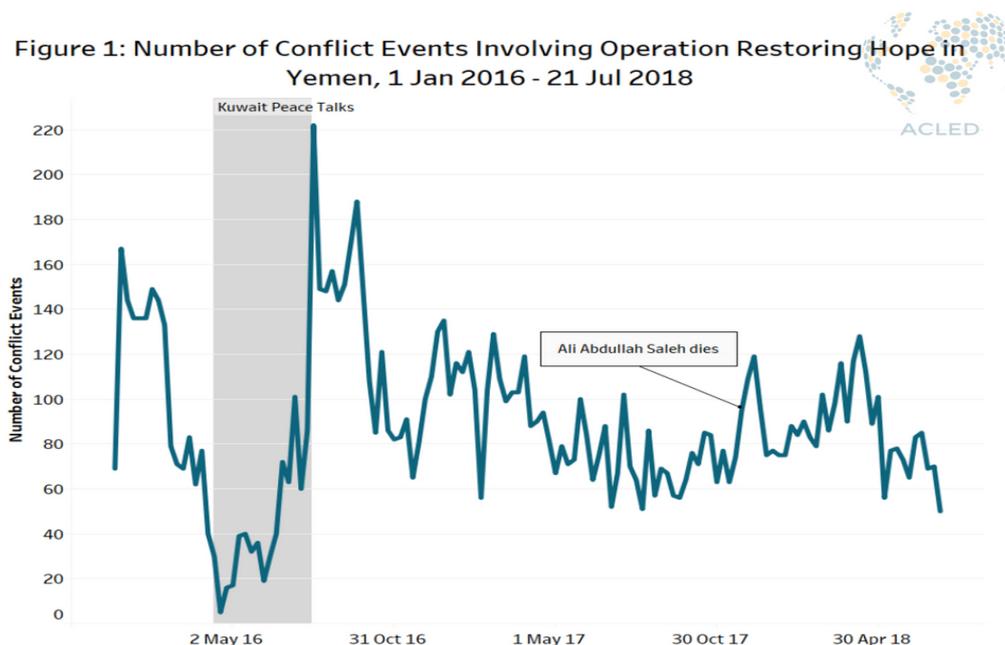
Menurut sebuah laporan, pada bulan September 2017, JIAT telah mengungkapkan "kesalahan hanya dalam tiga dari 15 insiden yang ditinjau, dan menyatakan bahwa koalisi telah bertindak sesuai dengan hukum humaniter internasional." Kritikus belum menerima pembenaran yang memadai. Menurut salah satu mantan pejabat A.S. yang memberi nasihat kepada pemerintah Saudi ketika meluncurkan JIAT, "Tidak cukup bagi mereka untuk mengidentifikasi masalah. Anda harus membuat perubahan pada operasi. "

Menanggapi kekhawatiran tentang korban sipil akibat serangan udara Saudi, Administrasi Obama menarik personel AS dari sel perencanaan bersama AS-Saudi pada Juni

2016, dan kemudian mengumumkan bahwa mereka akan menanggguhkan rencana penjualan amunisi berpemandu dengan presisi ke Arab Saudi. Pada tahun 2017, Presiden Trump mengumumkan niatnya untuk melanjutkan penjualan amunisi yang ditangguhkan dan, setelah peninjauan kebijakan, mengarahkan pemerintahannya “untuk fokus pada mengakhiri perang dan menghindari konflik regional, mengurangi krisis kemanusiaan, dan mempertahankan integritas teritorial Arab Saudi dan perdagangan di Laut Merah”.

Di bawah ini merupakan data yang menunjukkan jumlah konflik yang terjadi dari 2016 sampai 2018.

Gambar Konflik yang terjadi dari 2016 sampai 2018



Sumber : (Carboni, Special Focus On Coalition Forces In the Middle East : the Saudi-led Coalition in Yemen, 2019)

Sejak 2015, konflik yang berkecamuk di Yaman, sejumlah 91.600 orang meninggal dunia (Magoy, 2019). Jumlah korban tewas diperkirakan akan terus bertambah karena belum ada kesepakatan gencatan senjata yang memaksa pihak berkonflik untuk tidak mengangkat senjata. PBB mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Yaman saat ini sebagai krisis kemanusiaan dunia yang terburuk. Koordinator badan kemanusiaan PBB untuk Yaman, Jamie McGoldrick mengatakan hampir 40.000 orang menderita luka-luka akibat pertempuran, hal ini dikarenakan jutaan warga Yaman tinggal d daerah yang terkena dampak langsung pertempuran. (Shamil, 2017)

Sebuah lembaga riset dari The Legatum Institute menobatkan Yaman sebagai negara paling berbahaya di dunia (Asyhad, 2016), hal ini dikarenakan konflik yang terus menerus terjadi

hingga saat ini sehingga menciptakan sebuah ketidakamanan dan kesengsaraan bagi rakyatnya. Banyak anak balita yang menjadi korban, mereka meninggal setiap 10 menit yang seharusnya bisa dicegah (Novia, 2017). Sebanyak 18,8 juta jiwa orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Hanya kurang dari 45% fasilitas kesehatan yang dapat berfungsi, 274 fasilitas lainnya rusak dan hancur akibat perang. Pada tahun 2016 pecahnya penyakit kolera yang menyebabkan lebih dari 24.500 kasus terjadi di Yaman dan 108 diantaranya kematian. Sebanyak 462 ribu anak menderita malnutrisi akut dengan resiko komplikasi yang mengancam jiwa. Mereka juga mengalami kekurangan akses terhadap layanan air bersih, sanitasi dan juga kebersihan, sehingga memperparah meningkatnya resiko penyakit menular seperti diare akut, malaria dan kudis. (WHO, 2017)

Menurut Integrated Phase Classification (IPC) Konflik yang telah banyak menelan korban jiwa dan merusak infrastruktur publik dan swasta di Yaman telah mendestabilisasi sistem dan harga pasar, secara negatif telah mempengaruhi kesempatan kerja jutaan penduduk di Yaman. Menurut Peta Integrated Phase Classification (IPC) Juni 2016 di atas, dari total 22 gubernuran yang ada di Yaman, 10 gubernuran yaitu Taiz, Al Dhale, Al Bayda, Al Hudayda, Hajjah, Sa'ada, Lahij, Abyan, Shabwah dan Aden yang berwarna merah masuk dalam IPC Tahap 4 (emergency) dan 15 gubernuran yaitu Al Mahwit, Amanat al Asimah, Aden, Raymah, Ibb, Sana'a, Marib, Amran, Al Jawf, Taiz, Lahij, Hajjah, Al Mahrah, Al Hudayda dan Al Baydan yang berwarna orange masuk dalam IPC Tahap 3 (crisis), sedangkan Hadramawt dan Al Mahrah yang berwarna kuning masuk dalam IPC Tahap 2 (under pressure). (FAO, IPC Map of Yemen - June 2016, 2016)

IPC merupakan sarana untuk mengklasifikasi berbagai fase situasi keamanan pangan berdasarkan hasil dari kehidupan manusia dan mata pencaharian dengan cara mengumpulkan semua informasi keamanan pangan yang tersedia mulai dari angka produksi hingga tingkat keamanan masyarakat terhadap tingkat kekurangan gizi (Unit, 2017). Situasi krisis pangan yang terjadi terus mengalami kenaikan, menurut analisis IPC yang dirilis oleh PBB pada Juli 2017, lebih dari 17 juta orang di Yaman menghadapi kelaparan dan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 21% dari tahun sebelumnya

Menurut Integrated Phase Classification (IPC) Taiz, Al Hudayda, Hajjah, Sa'ada, Lahij, Abyan, Shabwah dan Aden masih berada dalam IPC Tahap 4. Abyan, Taiz dan Al Hudayda memiliki prevalensi Global Acute Malnutrition (GAM) atau Gizi Buruk di atas ambang batas WHO (= 15%) (IPC, 2017). Penyediaan layanan dasar, termasuk air, sanitasi, dan perawatan kesehatan, sangat terganggu. Negara ini menghadapi pendalaman kerawanan pangan yang diakibatkan kerusakan infrastruktur dan kekurangan bahan bakar dan pangan, yang semakin

diperburuk oleh impor yang terbatas. Namun akses bagi para pekerja kemanusiaan untuk memberikan bantuan masih sangat terbatas.

C. Upaya PBB dalam Melindungi Penduduk Yaman dari Krisis Kemanusiaan

1. Pelaksanaan *Responsibility to React* oleh PBB

PBB melakukan salah satu tanggung jawabnya sebagai organisasi pemelihara perdamaian dunia di kawasan konflik Yaman dengan melaksanakan *Responsibility to React*. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang merespon ketika ada suatu permasalahan terjadi. Dalam melakukan tanggung jawab ini, PBB menggunakan cara-cara damai untuk mencapai kepentingannya. Cara damai yang dapat dilakukan PBB yakni membuat resolusi, membuat komite khusus, mengutus perwakilan khusus, melakukan perundingan-perundingan dengan pihak yang terlibat, mengadakan konferensi internasional serta menjadi penengah saat pihak yang terlibat sedang melakukan negosiasi.

a. Pembuatan resolusi

PBB mengeluarkan resolusi 2201 pada tanggal 15 Februari 2015 yang berisi tentang kekecewaan PBB terhadap aksi kelompok Houthi yang mengganggu perdamaian Yaman (Report, UN Documents for Yemen: Security Council Resolutions, 2015). Kelompok Houthi telah berusaha untuk mengambil kekuasaan pemerintahan Yaman dan mengganti semua anggota parlemen. Dalam resolusi ini PBB melakukan beberapa tindakan yang ditujukan kepada Houthi agar dipatuhi. Hal-hal yang harus dilakukan Houthi yakni harus memiliki niat untuk bernegosiasi dengan PBB dan pemerintah Yaman, melepaskan kekuasaan pemerintah pusat serta pemerintah daerah, melepaskan Presiden Hadi dan jajarannya yang telah ditahan, serta menghentikan segala bentuk serangan yang dapat mengganggu perdamaian Yaman.

DK (Dewan Keamanan) PBB pada 14 April 2015 mengeluarkan Resolusi nomor 2216 tentang konflik di Yaman (Report, UN Documents for Yemen: Security Council Resolutions, 2015). Resolusi meminta Houthi mengakhiri penggunaan kekerasan, menarik pasukan mereka dari semua bidang yang telah mereka sita, termasuk ibukota Shana'a, melepaskan semua senjata dan disita oleh pihak keamanan, termasuk sistem rudal, serta menghentikan semua tindakan eksklusif yang sebetulnya dalam kewenangan Pemerintah yang sah Yaman.

Resolusi juga menambahkan, semua pihak agar menahan diri dari setiap provokasi atau ancaman terhadap negara tetangga, termasuk penggunaan rudal-rudal permukaan serta penimbunan senjata di setiap wilayah yang berbatasan dari negara tetangga. Houthi diminta melepaskan Mayor Jenderal Mahmoud Al-Subaihi, Menteri Pertahanan Yaman, semua tahanan politik, dan semua orang dalam tahanan rumah atau ditahan sewenang-wenang, serta mengakhiri

perekrutan dan penggunaan anak-anak dan membebaskan semua anak-anak dalam konflik Yaman.

Tuntunan lainnya dari resolusi, adalah menegaskan kembali dukungannya terhadap legitimasi Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi, dan menyeru kepada semua pihak dan negara-negara anggota untuk menahan diri dari mengambil tindakan apapun yang merusak persatuan, kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah Yaman, dan legitimasi Presiden Yaman. PBB juga mendesak semua pihak di Yaman untuk merespon positif terhadap permintaan Presiden Yaman, menghadiri sebuah konferensi di Riyadh, di bawah naungan Dewan Kerjasama Teluk, untuk lebih mendukung transisi politik di Yaman, dan untuk melengkapi dan mendukung perundingan yang ditengahi PBB. Resolusi DK PBB 2216 merupakan tindak lanjut permintaan Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang ditujukan kepada DK PBB serta kepada Dewan Kerjasama untuk Liga Arab dan negara-negara Arab Teluk agar segera memberi bantuan dengan cara apapun termasuk agresi militer untuk melindungi Yaman dari serangan militer Houthi.

Pada pasal lain Resolusi DK PBB Nomor 2216 mencantumkan soal embargo senjata. Dewan memutuskan bahwa semua negara anggota harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pasokan senjata langsung atau tidak langsung, penjualan atau pengalihan, atau untuk kepentingan Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya al Hakim, dan Abd al-Khaliq al-Houthi.

PBB mengeluarkan resolusi 2402 pada tanggal 26 Februari 2018. Resolusi ini merupakan bentuk tindakan tegas dari PBB kepada Houthi yang melancarkan serangan-serangan militer kepada pemerintah Yaman (Report, UN Documents for Yemen: Security Council Resolutions, 2018). Serangan tersebut telah mengakibatkan banyak kerugian dan korban jiwa meliputi penduduk sipil dan anak-anak. Serangan Houthi juga mengakibatkan penyakit yang menyebabkan korban semakin bertambah.

Resolusi ini berisi tentang pembekuan aset, larangan perjalanan dan embargo senjata. Pembekuan aset kepada kelompok Houthi ini bermaksud agar mereka tidak bisa menjual asetnya untuk membeli alat militer. Sedangkan larangan perjalanan agar mempersempit peluang para penyusup yang ingin mengganggu perdamaian Yaman. Kemudian PBB memberlakukan embargo senjata kepada Houthi bertujuan untuk mengurangi kesempatan Houthi menyerang pemerintah Yaman.

Pada tanggal 21 Desember 2018, PBB menerbitkan resolusi kembali untuk meredakan situasi di Yaman yang semakin memburuk (Report, UN Documents for Yemen: Security Council Resolutions, 2018). Pihak Houthi telah melanggar banyak kesepakatan yang disepakati. Houthi melakukan hal ini karena merasa pihaknya dirugikan atas kesepakatan-kesepakatan yang ada.

Atas dasar tersebut, Houthi tetap secara berkala menyerang pasukan pemerintah Yaman dan koalisi internasional.

Resolusi ini mengingatkan kembali kepada pihak pemerintah Yaman dan kelompok Houthi untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati di Stockholm serta meluruskan kembali segala hambatan untuk implementasi perjanjiannya. Resolusi ini juga bermaksud untuk menahan pihak-pihak yang berkonflik melakukan agresi militer sehingga tidak terjadi pertumpahan darah.

b. Mengirim utusan khusus

Pada 25 April 2015, Sekretaris Jendral PBB Ban Ki Moon menunjuk Ismail Ahmed untuk menjadi atasan khusus PBB untuk menangani krisis Yaman. Tugas Ismail Ahmed yakni menjadi penengah antar kedua belah pihak, memberi saran-saran, dan mengadakan perundingan. Ismail Ahmed juga memberi laporan kepada kantor pusat PBB setiap 60 hari. Ismail Ahmed dapat menjadi perantara antara kedua belah pihak agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Pihak yang berkonflik dapat menyampaikan aspirasinya atau saran melalui Ismail Ahmed. (Nations, United Nations in Yemen, 2018)

Dalam melaksanakan tugasnya Ismail Ahmed telah melaksanakan 2 kali perundingan dalam masa penugasannya. Perundingan ini mempertemukan pihak pemerintah Yaman dan kelompok Houthi. Ismail Ahmed menyelenggarakan perundingan tersebut di Swiss dan Kuwait. Kedua negara ini dipilih dengan alasan memiliki kenetralan yang adil untuk kedua belah pihak. Pada kesempatan ini, kedua belah pihak dapat bernegosiasi untuk kepentingan bersama.

Perundingan pertama dilaksanakan pada tanggal 15-21 Desember 2015 di Bern, Swiss. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah Yaman dan kelompok Houthi yang ditengahi oleh PBB. Pertemuan ini diagendakan karena gencatan senjata yang sebelumnya disepakati telah dilanggar. PBB berusaha menemukan titik temu antar kedua belah pihak dan mengakhiri perang serta gencatan senjata secara permanen.

Pada pertemuan ini, kedua belah pihak masih sulit untuk percaya satu sama lain. Hal ini dikarenakan kesepakatan-kesepakatan seperti melepaskan tahanan dan gencatan senjata sering dilanggar oleh keduanya. Kedua belah sama-sama tidak menghormati perjanjian yang sudah disetujui masing-masing. PBB selaku pihak penengah dalam pertemuan ini mencairkan suasana dengan memberi beberapa proposal saran yang sama-sama tidak merugikan kepada kedua belah pihak.

Hasil dari pertemuan di Bern ini akhirnya kedua belah pihak telah menyetujui proposal dari PBB. Proposal tersebut yakni kedua belah pihak membubarkan semua blokade agar akses jalan kembali normal, membuka akses bantuan kemanusiaan, melakukan gencatan senjata, melepaskan para tahanan dan menarik semua pasukan militer mundur dari wilayah penduduk.

Menanggapi perjanjian yang disepakati dalam perundingan di Swiss, kedua belah pihak masih tetap melanggar isi dari perjanjian tersebut. Pihak yang berkonflik masih melakukan agresi militer kepada masing-masing pertahanan. Agresi ini kembali mengakibatkan kerugian yang besar, kerusakan bangunan serta korban jiwa. Merespon hal ini, Ismail Ahmed mengadakan pertemuan yang kedua antar kedua belah pihak.

Ismail Ahmed menyelenggarakan pertemuan kedua pada April 2016 di Kuwait (Ghobari, 2016). Pertemuan ini kembali mempertemukan kedua belah pihak dan ditengahi oleh PBB. Dalam pertemuan ini memiliki fokus untuk membuat pemerintahan yang lebih inklusif dan mengembalikan otoritas negara kepada negara, yang telah terbagi antara pemerintahan Yaman dan pemerintahan Houthi serta mengakhiri aksi saling serang.

Dalam pertemuan ini, kondisi antar kedua pihak masih sulit untuk mengarah pada titik damai. Hal ini dikarenakan masih terjadi serangan anatar keduanya di Yaman. Dalam 24 jam pertemuan, di sisi lain terdapat pertempuran di wilayah selatan Yaman yang menewaskan 42 orang, Kondisi ini semakin memperparah jalannya pertemuan yang sedang berlangsung. Saran maupun proposal belum disepakati dalam pertemuan ini. Pada akhirnya, pihak Houthi meninggalkan forum pertemuan karena merasa isi pertemuan sudah tidak menguntungkan bagi pihaknya. Pertemuan ini dianggap gagal karena tidak kesepakatan yang terjadi antar kedua belah pihak.

Pada tanggal 16 Februari 2018, Sekretaris Jendral saat ini yakni Antonio Guterres menunjuk Martin Griffiths sebagai utusan khusus PBB untuk Yaman menggantikan Ismail Ahmed (UN, Martin Griffiths, 2018). Penggantian ini bertujuan untuk mengawali periode baru mendamaikan krisis Yaman. Antonio Guterres berharap Martin Griffiths dapat menjadi aktor penting agar terciptanya perdamaian kembali bagi penduduk Yaman.

Dalam masa jabatannya sebagai utusan khusus, Martin Griffiths mengawali kinerjanya dengan mengadakan pertemuan yang berlokasi di Stockholm, Swedia. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 6-13 Desember 2018. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah Houthi dan kelompok Houthi. Pertemuan ini diselenggarakan atas dasar konflik yang tidak pernah usai dan menimbulkan masalah-masalah yang lebih kompleks pada negara dan penduduk Yaman.

Pada pertemuan ini kedua pihak memberikan usulan serta rekomendasi untuk kepentingan bersama. Kedua belah pihak sama-sama memiliki niat yang lebih baik daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dalam pertemuan yang telah dilakukan beberapa kali, kedua belah pihak masih belum bisa diajak untuk kearah perdamaian. Pertemuan ini pun diakhiri dengan menyepakati Perjanjian Stockholm.

Perjanjian Stockholm ini bertujuan untuk mencegah situasi Yaman ke arah yang lebih buruk. Perjanjian ini menyepakati yakni, yang pertama, saling membebaskan para tahanan. Total tahanan yang ditahan oleh masing-masing pihak mencapai 15.000 orang. Tahanan ini merupakan para pejabat, kerabat maupun penduduk sipil. Kedua, pembukaan kembali bandara Sanaa. Bandara Sanaa merupakan bandara yang vital bagi Yaman. Bandara ini menjadi salah satu yang paling penting untuk fasilitas transportasi bagi penduduk Yaman. Ketiga, mengintegrasikan bank-bank sentral Yaman untuk membayar gaji pegawai negeri. Kelompok Houthi telah menguasai bank-bank yang memiliki peran penting dalam keseimbangan ekonomi Yaman. Sejak dikuasai oleh kelompok Houthi, bank-bank ini hanya mendukung aktivitas keuangan Houthi. Pengambil alihan bank yang dilakukan oleh Houthi ini juga bertujuan untuk mempersiapkan menguasai pemerintahan Yaman. Keempat, mengakhiri pertempuran di Hodeida dan Taiz dan Kelima, bersama-sama merancang konsensus rencana untuk berdamai. Pemerintah Yaman dan kelompok Houthi diharapkan memiliki niat yang baik untuk mencari solusi bersama demi berakhirnya konflik ini. (Salisbury, 2018)

2. Pemberian Humanitarian Assistance oleh PBB

Langkah PBB dalam membantu penduduk Yaman yakni dengan membuat program Yaman Humanitarian Response Plan (YHRP) (OCHA, Yemen: Humanitarian Response Plan January-December 2018, 2018). YHRP merupakan strategi PBB untuk mengurangi dan menyelesaikan krisis kemanusiaan di Yaman. YHRP memiliki tujuan objek utama, yakni :

1. memberi bantuan penyelamatan jiwa kepada orang-orang yang kritis melalui respon yang cepat dan efektif,
2. memastikan semua bentuk bantuan kemanusiaan diberikan secara adil kepada pria, wanita dan anak-anak,
3. mendukung dan memperbanyak layanan dan lembaga untuk turut aktif membantu bersama,
4. memberikan respon bantuan yang jelas, multi-sektoral, terkoordinasi dan inklusif yang bertanggung jawab.

Dalam mensukseskan YHRP, PBB mempunyai program membantu Yaman dengan membuat pertemuan antar negara-negara anggota yang mana diselenggarakan penggalangan dana. Dari tahun 2015 sampai 2018 PBB selalu mengadakan pertemuan antar negara anggota untuk mendonasikan sejumlah dana untuk bantuan kemanusiaan, yang disebut High-Level Pledging Event. Pada pertemuan ini, negara-negara anggota menyerahkan donasinya dan membahas strategi terbaru untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Yaman.

Dimulai pada tahun 2015, High Level Pledging Event diselenggarakan pada tanggal 9 November 2015 di New York. Pada pertemuan ini PBB membahas dua topik yakni donasi untuk aktivitas pembangunan dan penanganan masalah pangan dan pertanian. Dalam pertemuan ini, donasi yang terkumpul sebanyak 57,2 Juta US Dollar. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan masalah ekonomi di negara masing-masing yang menghambat jumlah donasi. Pada tahun berikutnya yakni, 7 November 2016, PBB menggelar lagi pertemuan ini di New York. Topik pembahasan yang dibahas masih sama dengan tahun sebelumnya. Dana yang terkumpul meningkat hampir 50 persen dari tahun 2015, yakni 107,2 Juta US Dollar. Pada tahun 2017, PBB menyelenggarakan High Level Pledging Event pada tanggal 6 November 2017 di Geneva, Swiss. Pertemuan ini dihadiri oleh 73 negara anggota PBB. Pada pertemuan ini, dana yang terkumpul sebanyak 175,6 Juta US Dollar. Pada tahun 2018, PBB kembali menggelar pertemuan pengumpulan donasi ini pada 7 Desember 2018. Jumlah donasi yang dapat dikumpulkan sejumlah 208,7 Juta US Dollar. (OCHA, 2018)

PBB selaku organisasi internasional telah memberikan kontribusi yang signifikan dari tahun ke tahun. PBB selalu mempromosikan penanganan isu kemanusiaan serta perdamaian bersama setiap tahun melalui pertemuan ini. Dari jumlah donasi diatas, PBB telah sukses menggerakkan negara-negara anggota untuk menangani krisis kemanusiaan di Yaman dengan serius. Beberapa negara dengan penghasilan negara yang banyak seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Jerman dan negara maju lainnya setiap tahun selalu aktif membantu menuntaskan krisis ini. Data di bawah ini merupakan daftar negara dengan jumlah total donasi terbanyak.

Alokasi dana bantuan PBB diatur dengan inklusif, efisien dan transparan. Dana bantuan dialokasikan pada kebutuhan yang paling kritis secara tepat waktu. Prioritas dana dialokasikan pada sektor makanan, nutrisi, kesehatan dan air bersih. Donasi ini juga dialokasikan untuk dana cadangan. Dana cadangan dialokasikan pada keadaan yang tak terduga, darurat dan kebutuhan strategis secara cepat dan fleksibel. Proses alokasi dana cadangan bersifat lebih cepat untuk memungkinkan respon yang tanggap terhadap keadaan darurat. Dana darurat dapat dialokasikan untuk memperbaiki, mengurangi dan mencegah timbulnya korban jiwa, kerusakan fisik dan psikologi atau ancaman yang dapat merusak perdamaian penduduk Yaman. Kemudian, dana cadangan juga dapat dipakai ketika ada serangan secara tiba-tiba, yang mana diperuntukkan untuk layanan kemanusiaan.

VII. Kesimpulan

PBB sebagai organisasi internasional yang melindungi hak-hak kemanusiaan di seluruh dunia telah melakukan upaya-upaya yang maksimal untuk memberikan perlindungan kemanusiaan bagi penduduk sipil Yaman dengan cara-cara yang berdasarkan konsep *Responsibility to Protect* (R2P) dan memberikan Humanitarian Assistance. Dalam upayanya menuntaskan krisis kemanusiaan di Yaman, PBB telah berusaha dengan memakai berbagai cara damai. PBB memang tidak dapat melindungi semua penduduk Yaman dan masih belum bisa menghentikan konflik di Yaman, namun PBB telah berhasil membawa beberapa perubahan di Yaman. PBB berhasil beberapa kali membuat kesepakatan gencatan senjata antar kedua belah pihak, mengaktifkan kembali fasilitas umum, membuka akses masuk bantuan kemanusiaan, memberi akses kesehatan, memberi tempat tinggal, mempermudah akses air bersih dan mengaktifkan lagi bandara dan pelabuhan.

PBB juga berhasil mempromosikan perdamaian bersama kepada negara-negara anggotanya untuk sadar dan membantu penduduk sipil Yaman. Hasilnya setiap tahun jumlah negara dan total donasi selalu bertambah. Pada masalah ini, PBB memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak kemanusiaan penduduk sipil Yaman yang mengalami musibah yang memprihatinkan. PBB memiliki kekuatan yang besar dalam berusaha menuntaskan konflik. PBB juga memiliki dukungan yang banyak dari negara anggotanya untuk membantu penduduk sipil Yaman memperoleh perdamaian kembali seperti sedia kala.

Daftar Pustaka

- Asyhad, M. H. (2016, November 7). *Yaman: Negara Paling Miskin di Dunia Iya, Paling Berbahaya Juga Iya*. Retrieved from intisari.grid.id: <http://intisari.grid.id/Intisari-News/Yaman-NegaraPaling-Miskin-Di-Dunia-Iya-Paling-Berbahaya-Jugalya>
- BBC. (2018, January 30). *Yemen crisis: Who is fighting whom?* Retrieved May 31, 2018, from BBC: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423>
- Besheer, M. (2015, Juni 19). *Yemen Talks in Geneva End Without Deal*. Retrieved from www.voanews.com: <https://www.voanews.com/europe/yemen-talks-geneva-end-without-deal>
- Carboni, A. (2019). *Special Focus On Coalition Forces In the Middle East : the Saudi-led Coalition in Yemen*. Retrieved from <https://www.acleddata.com>: <https://www.acleddata.com/2018/07/31/special-focus-on-coalition-forces-in-the-middle-east-the-saudi-led-coalition-in-yemen/>
- FAO. (2016). *IPC Map of Yemen - June 2016*. Retrieved from www.fao.org: <http://www.fao.org/emergencies/resources/maps/detail/en/c/419109/>
- FAO. (2017). *IPC Map of Yemen - March-July 2017*. Retrieved from <http://www.fao.org>: <http://www.fao.org/resilience/multimedia/maps/detail/en/c/847475/>
- Ghobari, M. (2016). *U.N.-sponsored Yemen peace talks begin in Kuwait*. Retrieved July 5, 2019, from <https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-talks/u-n-sponsored-yemen-peace-talks-begin-in-kuwait-idUSKCN0X12B2>
- IPC. (2017, Maret 15). *IPC in Yemen Food Insecurity Continues to Worsen*. Retrieved from [ipcinfo.org](http://www.ipcinfo.org): http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Alert_7_Yemen_March2017.pdf
- Lister, T. (2015, April 8). *The war in Yemen is getting worse - and a civilian catastrophe is looming*. Retrieved from CNN.COM: <https://edition.cnn.com/2015/04/08/middleeast/yemen-saudi-6-things-lister/index.html>
- Luthfi, M. (2014, Oktober 20). *Yaman Menuju Situasi Sebelum 1990 (1)*. Retrieved from Hidayatullah.com: <https://www.hidayatullah.com/kolom/analisa-duniaislam/read/2014/10/20/31602/yaman-menuju-situasisebelum-1990-1.html>
- Magoy, S. (2019, June 20). *Database says 91,600 killed in Yemen fighting since 2015*. Retrieved from APNEWS: <https://www.apnews.com/b28a2bdb1b01413689e05a7204e6ea90>

- Nations, U. (2018). *United Nations in Yemen*. Retrieved July 4, 2019, from <http://ye.one.un.org/content/unct/yemen/en/home/what-we-do.html>
- Novia, D. R. (2017, Mei 4). *Tragedi Kemanusiaan dan Krisis Pangan di Yaman Mengkhawatirkan*. Retrieved from www.republika.co.id: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timurtengah/17/05/04/opfjqc377-tragedi-kemanusiaan-dankrisis-pangan-di-yaman-mengkhawatirkan>
- OCHA. (2018). Retrieved May 5, 2019, from <https://cbpf.unocha.org/>
- OCHA. (2018). *Yemen: Humanitarian Response Plan January-December 2018*. Retrieved July 6, 2019, from <https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2018-enar>
- OCHA. (2019). *Yemen Funding*. Retrieved from cbpf.unocha.org: <https://cbpf.unocha.org/>
- OSESGY. (2019). *Security Council Resolutions*. Retrieved from <https://osesgy.unmissions.org>: <https://osesgy.unmissions.org/security-council-resolutions>
- Report, S. C. (2015, February 15). *UN Documents for Yemen: Security Council Resolutions*. Retrieved May 5, 2019, from https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/?ctype=Yemen&cbtype=yemen
- Report, S. C. (2015, April 14). *UN Documents for Yemen: Security Council Resolutions*. Retrieved May 5, 2019, from https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/?ctype=Yemen&cbtype=yemen
- Report, S. C. (2018, February 26). *UN Documents for Yemen: Security Council Resolutions*. Retrieved May 5, 2019, from https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/?ctype=Yemen&cbtype=yemen
- Report, S. C. (2018, December 21). *UN Documents for Yemen: Security Council Resolutions*. Retrieved May 5, 2019, from https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/?ctype=Yemen&cbtype=yemen
- Republika, N. (2017, Mei 22). *Sejarah Hari Ini: Bersatunya Yaman Selatan dan Utara Sebagai Republik Yaman*. Retrieved from internasional.republika.co.id: <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/selarung-waktu/17/05/22/oqcout415-sejarah-hari-inibersatunya-yaman-selatan-dan-utara-sebagai-republikyaman>

- Salisbury, P. (2018). *What does the Stockholm agreement mean for Yemen?* Retrieved July 5, 2019, from https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/12/21/what-does-the-stockholm-agreement-mean-for-yemen/?noredirect=on&utm_term=.04ea8c2c9844
- Shamil, M. (2017, Januari 18). *Jumlah Korban Tewas Capai 10.000 Warga Sipil*. Retrieved from <https://international.sindonews.com:https://international.sindonews.com/read/1172145/44/jumlah-korban-tewas-capai-10000-warga-sipil1484753346>
- UN. (2018). *Martin Griffiths*. Retrieved May 5, 2019, from <https://www.un.org/sg/en/content/profiles/martin-griffiths>
- UN. (2018, Juni 28). *Safety of civilians in key Yemeni port, 'intrinsically' linked to restarting long-term peace negotiations: UN Special Envoy*. Retrieved from <https://news.un.org:https://news.un.org/en/audio/2018/06/1013482>
- UNHDR. (2019). *Human Development Indicator of Yemen*. Retrieved from UNHDR.org: <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/YEM>
- Unit, F. S. (2017). *Food Security and Nutrition Analysis Unit - Somalia*. Retrieved from [fsnau.org: http://www.fsnau.org/ipc](http://www.fsnau.org:fsnau.org)
- UNOCHA. (2019). *Yemen 2019 (Humanitarian response plan)*. Retrieved from <https://fts.unocha.org:https://fts.unocha.org/appeals/675/summary>
- WHO. (2017, April). *Impending famine, ongoing fighting and a failing health*. Retrieved from [www.who.int: http://www.who.int/hac/crises/yem/appeals/whodonorupdate-april2017.pdf?ua=1](http://www.who.int:www.who.int/hac/crises/yem/appeals/whodonorupdate-april2017.pdf?ua=1)